

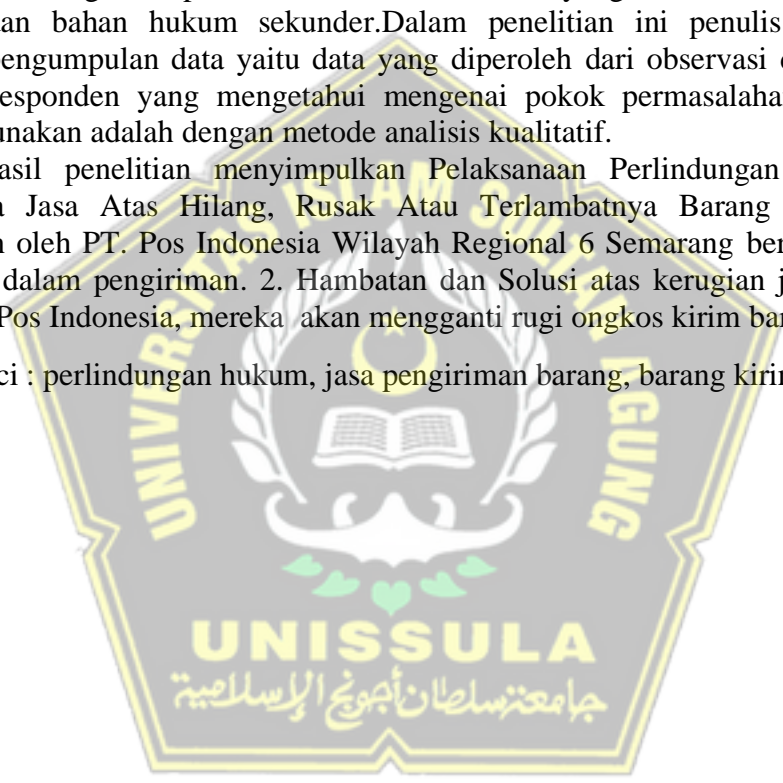
## ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum untuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengiriman barang adalah undang-undang NRI Tahun 1945 KUHPerdara No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengiriman barang atas hilang, rusak atau terlambatnya barang kiriman ditinjau dari hukum perlindungan konsumen diPT. Pos Indonesia (Persero) wilayah regional 6 semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative doctrinal yaitu pendekatan yang dikonsepsikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu dari hasil wawancara dengan responden, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan responden yang mengetahui mengenai pokok permasalahan.Analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Atas Hilang, Rusak Atau Terlambatnya Barang Kiriman yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Wilayah Regional 6 Semarang berupa aturan dan prosedur dalam pengiriman. 2. Hambatan dan Solusi atas kerugian jika disebabkan oleh PT. Pos Indonesia, mereka akan mengganti rugi ongkos kirim barang tersebut.

Kata kunci : perlindungan hukum, jasa pengiriman barang, barang kiriman.



## **ABSTRACT**

*The statutory regulations that become the legal basis for legal protection for users of goods delivery services are the Law of the Republic of Indonesia of 1945, KUHPerdata No.8 of 1999 concerning consumer protection. This study aims to determine the implementation of legal protection for users of goods delivery services for lost, damaged or late shipment in terms of consumer protection law at PT. Pos Indonesia (Persero) region 6 semarang.*

*The approach method used in this research is doctrinal normative, namely an approach that is conceptualized based on statutory regulations. Sources of data in this study are primary data, namely from interviews with respondents, and secondary data consisting of primary and secondary legal materials. In this study the authors used data collection methods, namely data obtained from observations and interviews with respondents who knew about the subject matter. The data analysis used is the qualitative analysis method.*

*The results of the study concluded that the implementation of legal protection for service users for lost, damaged or delayed shipments carried out by PT. Pos Indonesia Regional Region 6 Semarang in the form of rules and procedures in shipping. 2. Barriers and Solutions for losses if caused by PT. Pos Indonesia, they will compensate for the postage of the goods.*

